

## DKUM Depok: Keberadaan UMKM Sangat Menopang Perekonomian Warga

DEPOK (IM) - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok, Mohamad Thamrin mengatakan keberadaan UMKM sangat menopang perekonomian warga Kota Depok, apalagi saat pandemi COVID-19 yang membuat perekonomian turun drastis.

"Tetapi keberadaan UMKM Depok mampu bertahan di tengah gempuran fenomena tersebut," kata Mohamad Thamrin di Depok, Jumat (26/4).

Thamrin mengatakan kini laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok berada di atas Provinsi Jawa Barat dan Nasional yaitu 5,05 persen. Lalu angka kemiskinan juga berkurang menjadi 2,3 persen.

"Termasuk Tingkat Pengangguran Terbuka saat COVID-19 hampir di angka 9,7 persen kini Alhamdulillah sudah turun jadi 6,9 persen," ujarnya.

Untuk itu kami sangat berharap pelaku usaha mikro ini tetap gencar memasarkan produknya minimal ke tetangganya. Kemudian,

terbuka dan transparan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan agar omzet terus naik.

Untuk meningkatkan pengetahuan dunia usaha lebih dalam lagi DKUM Kota Depok menggelar talkshow bertajuk Sinergi UMKM Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Depok.

Mohamad Thamrin menjelaskan talkshow ini diikuti 50 pelaku usaha mikro baik dari dalam maupun luar daerah. Mayoritas peserta adalah ibu-ibu yang kesehariannya berwirausaha mikro.

"Melalui talkshow ini kami ingin memberikan semangat dan wawasan pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya, pola manajemennya dan sebagainya," tuturnya.

Pada talkshow ini, dua pengusaha sukses asal Kota Depok menjadi narasumber. Mereka adalah CEO AKP Group, Kintoko dan Andhika Ramadhan seorang yang dulunya anak jalanan kini menjadi CEO perusahaan. ● yan

## Ahok, Risma, dan Andika Perkasa Masuk Bursa Pilgub Jakarta dari PDIP

JAKARTA (IM) - PDIP mulai menggodok nama-nama yang bakal diusung di Pilgub Jakarta pada 27 November 2024 mendatang. Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengungkapkan, sejumlah nama masuk dalam radar PDIP.

Nama-nama tersebut, antara lain, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi.

"Ya kan masih proses peninjauan, bisa Risma, bisa saja Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, termasuk juga misalnya, Azwar Anas," ujar Pantas.

kepada wartawan, Jumat (26/4).

Menurutnya, sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan PDIP dalam memilih bakal cagub Jakarta, yakni komitmen terhadap ideologi Pancasila, elektabilitas hingga keselarasan membangun Jakarta ke depan.

"Beberapa hal-hal yang laten di DKI Jakarta itu harus menjadi perhatian pemimpin-pemimpin yang akan datang," tandas Pantas.

Pantas mengungkapkan, PDIP kemungkinan besar akan mengumumkan nama bakal calon gubernur pada Mei 2024 mendatang. Menurut dia, PDIP juga mengusung calon kepala daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka untuk masyarakat.

"Kader terbaik nantinya kita angkat ke jabatan yang punya nilai tanggung jawab lebih besar," pungkas Pantas. ● yan



**AKROBATIK FREESTYLE SLAM DUNK DI MAL**  
Pegiat akrobatik freestyle asal Hungaria, Face Team unjuk kebolehan dalam memasukkan bola dengan Slam Dunk di Mal Kota Kasablanka, Jakarta, Kamis (25/4). Kegiatan itu guna memasyarakatkan olahraga basket dan memeriahkan DBL Festival 2024, yang merupakan festival basket pelajar terbesar di Indonesia.

## Alat Kontrasepsi Berserakan Sepanjang Jalan Tubagus Angke Jakarta Barat

JAKARTA (IM) - Alat kontrasepsi kondom ditemukan berserakan di sepanjang pinggir kali Jalan Tubagus Angke, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Kondom tersebut berserakan lantaran diduga lokasi tersebut dijadikan tempat prostitusi. Puluhan alat kontrasepsi itu ditemukan berserakan pertama kali oleh warga yang melintas di lokasi tersebut.

Camat Grogol Petamburan, Agus Sulaeman mengatakan pihaknya telah memerintahkan jajaran untuk menindaklanjuti.

"Barusan saya sudah perintahkan ke Lurah untuk dilakukan yang pertama pembersihan dulu," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (26/4).

Menurut Agus, penemuan puluhan alat kontrasepsi bekas pakai itu lantaran di lokasi tersebut diduga dijadikan tempat prostitusi liar.

"Mungkin iya, mungkin

ada prostitusi liar lah ya, yang kayak begitu-begitu," katanya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa pihaknya untuk sementara membersihkan alat kontrasepsi di lokasi tersebut.

Ia menegaskan, kegiatan penertiban telah dilakukan secara rutin di lokasi tersebut. Hanya saja, penertiban belum maksimal.

"Kalau kegiatan rutin kita penertiban sudah rutin cuma kadang-kadang penertiban itu juga apa namanya, bocor ya, jadi gak efektif gitu. Memang penertibannya harus secara diam-diam," jelas Agus.

Untuk memaksimalkan penertiban, lanjut Agus, pihaknya akan menggandeng tiga pilar melakukan razia.

"Kita akan rencanakan untuk penertiban yg lebih komprehensif dengan melibatkan unsur TNI Polri. Akan saya coba nanti dengan tingkat Walikota," pungkasnya. ● yan

# 4 Metropolis

IDN/ANTARA



## AKSI TOLAK WHO PANDEMIC TREATY

Sejumlah pengunjung rasa menggelar aksi menolak World Health Organization (WHO) Pandemic Treaty di depan kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/4). Massa aksi gabungan tersebut menuntut pemerintah agar menolak perjanjian pandemi (pandemic treaty) oleh WHO yang akan disahkan di sidang ke-77 pada Mei 2024 karena dinilai akan merugikan masyarakat dan negara secara hukum pemerintahan dunia.

## Warga DKI yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga yang terdampak dapat kembali mengaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka. Peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-nya dapat melaporkan langsung ke Disdukcapil DKI Jakarta untuk kembali diverifikasi.

JAKARTA (IM) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) telah resmi melakukan penonaktifan NIK warga DKI yang tak lagi berdomisili di Jakarta.

Imbasnya warga yang menerima layanan kesehatan yakni BPJS Kesehatan untuk sementara waktu.

Kepala Humas BPJS Ke-

sehatan, Rizky Anugerah membenarkan hal tersebut.

Penggunaan BPJS Kesehatan sangat erat dengan NIK warga. Karena itu, saat NIK dinonaktifkan maka secara otomatis kepesertaan JKN juga tidak aktif.

"Bagi peserta JKN yang didaftarkan melalui anggaran Pemda DKI Jakarta dan terkena dampak penonaktifan atas NIK tersebut, dapat disampaikan bahwa kepesertaan JKN tersebut otomatis dinonaktifkan," kata dia saat dihubungi, Jumat (26/4).

Meski demikian, warga

yang terdampak dapat kembali mengaktifkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mereka.

Rizky menjelaskan, peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaan JKN-nya dapat melaporkan langsung ke Disdukcapil DKI Jakarta untuk kembali diverifikasi.

Verifikasi berkaitan dengan kejelasan domisili atau tempat tinggal yang bersangkutan.

Jika hasil verifikasi masih dapat dijamin oleh Pemda DKI, maka Pemda DKI akan kembali mengajukan pengaktifan kartu (Kartu Indonesia Sehat (KIS-nya) ke BPJS Kesehatan.

"Namun apabila tidak dapat dijamin, maka peserta bisa mengubah segmen kepesertaan menjadi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBBU) atau peserta mandiri dengan mengaktifkan kembali NIK di Dukcapil," ungkap dia. ● yan

## Heru Budi Harap "Groundbreaking" MRT East-West Bisa Terealisasi Agustus 2024

JAKARTA (IM) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berharap groundbreaking proyek MRT Jakarta East-West bersama Pemerintah Jepang dapat dilaksanakan pada Agustus 2024. Harapan itu disampaikan Heru saat menghadiri Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Jepang.

"Harapannya Loan Agreement proyek MRT East-West dapat segera ditandatangani agar rencana groundbreaking pada bulan Agustus 2024 dapat terealisasi," ujar Heru Budi dalam keterangan resminya, Jumat (26/4).

Menurut Heru Budi, pengembangan jaringan MRT timur ke barat yang menghubungkan Balaraja, Banten, dengan Cikarang, Bekasi, akan meningkatkan aksesibilitas transportasi untuk masyarakat.

"Ini juga menciptakan peluang investasi, terutama dalam pengembangan TOD, memperkuat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup penduduk Jakarta, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia," kata Heru Budi.

Sebagai informasi, Pemerintah Jepang telah sepakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan proyek MRT Jakarta East-West Line Fase 1. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Cooperation (MoC) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang tentang kelanjutan pembangunan MRT Jakarta East-West Line Fase 1 yang berlangsung di Bali, Senin (14/11/2022).

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan MRT di Jakarta, sehingga mampu mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"Jepang dan Inggris merupakan dua mitra strat-

## Pemprov DKI Buka Suara Soal Kawasan Kumuh 1 Km dari Istana

JAKARTA (IM) - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menyoroti keberadaan permukiman yang menurutnya kumuh pada radius 1 km dari Istana Negara. Pemprov DKI Jakarta menjawab persoalan tersebut.

Awalnya, Prasetyo Edi Marsudi menyoroti tata kota Jakarta. Dia mengatakan masih ada permukiman kumuh yang lokasinya tak jauh dari Istana Negara.

"Ada daerah Istana Negara saat ini hanya jarak 1 kilometer, masih ada daerah kumuh, penataan kota sampai hari ini masih carut-marut dengan adanya kebijakan pemerintah pusat," kata Prasetyo di sela rapat LPKJ Gubernur DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jumat (26/4).

Prasetyo juga menyoroti pembahasan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang tak melibatkan DPRD DKI Jakarta maupun pemerintah

daerah. Dia mempertanyakan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota global usai tak lagi menyangand status Ibu Kota.

"Bukan bicara kuat atau tidak kuat, harusnya pendalaman kita sebagai anggota parlemen harusnya diajak diskusi konklusi, makanya kalau bicara global globalnya di mana," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta kemudian merespons ucapan Prasetyo yang menyoroti permukiman kumuh 1 Km dari Istana. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Cipta) DKI Jakarta, Heru Hermawanto, meminta agar semua pihak melihat kondisi melalui Google.

"Teman-teman bisa melihat lah di Google, di foto udara kira kira seperti apa, faktanya bagaimana, saya nggak bisa banyak komentar ya faktanya itu dilihat sendiri fotonya. Teman-teman menilai itu kumuh atau tidak," kata Heru di sela rapat LKJP Gubernur DKI Jakarta ber-

sama DPRD, hari ini.

Heru mengatakan ada dua kriteria kumuh, yaitu kumuh secara fisik dan kumuh berdasarkan aspek sosial. Sehingga, Heru memandang perlu dilakukan pengecekan mengenai lingkungan kumuh yang dimaksud.

"Jadi ada kumuh itu karena bangunannya berantakan, tapi standarnya memenuhi," ujarnya.

"Tapi kalau kumuh dalam kategori aspek sosial itu berbeda lagi peningkatannya, lebih ke RTRW kumuhnya kumuh berapa. Nah itu masuk RTRW kategori itu nggak, tapi dalam konteks fisik bisa saja itu disebut kumuh," sambung-

nya.

Lalu, apakah lingkungan di radius 1 Km dari Istana bakal ditata?

"Karena itu masing-masing orangnya ada orang per orang yang miliki. Jenengan (anda) punya di situ mau ditata, ya belum tentu," ucapnya. ● yan



## PERINGATAN HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA

Seorang wisatawan asing (kiri) berswafoto saat mengukur tekanan darah oleh relawan saat peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di kawasan Kota Tua, Jakarta Jumat (26/4). Kegiatan yang diadakan dari tanggal 26-27 April 2024 memberikan edukasi dan menampilkan peralatan yang digunakan untuk penanggulangan bencana kepada masyarakat.